

RENCANA AKSI PENCAPAIAN TARGET KINERJA

UNIT KERJA : PERWAKILAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN : 2026

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2026	RENCANA PENCAPAIAN KINERJA				RENCANA WAKTU PENYELESAIAN	RENCANA KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
			TW I	TW II	TW III	TW IV			
Terwujudnya Penyelesaian Laporan/ Pengaduan Masyarakat yang Efektif	Jumlah laporan/pengaduan masyarakat yang diselesaikan Ombudsman RI Perwakilan	213 Laporan	45	57	56	55	TW IV	Triwulan I: - Keasistenan Pemeriksaan Laporan dan Keasistenan PVL akan menyelesaikan sebanyak 45 laporan. Triwulan II: - Keasistenan Pemeriksaan Laporan dan Keasistenan PVL akan menyelesaikan sebanyak 57 laporan.	Keasistenan Pemeriksaan Laporan dan Keasistenan Penerimaan dan Verifikasi Laporan (PVL)

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2026	RENCANA PENCAPAIAN KINERJA				RENCANA WAKTU PENYELESAIAN	RENCANA KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
			TW I	TW II	TW III	TW IV			
								- Keasistenan Pemeriksaan akan melakukan konsinyering LHP. Triwulan III: - Keasistenan Pemeriksaan Laporan dan Keasistenan PVL akan menyelesaikan sebanyak 56 laporan. Triwulan IV: - Keasistenan Pemeriksaan Laporan dan Keasistenan PVL akan menyelesaikan sebanyak 55 laporan. - Keasistenan Pemeriksaan Laporan rencana	

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2026	RENCANA PENCAPAIAN KINERJA				RENCANA WAKTU PENYELESAIAN	RENCANA KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
			TW I	TW II	TW III	TW IV			
								melakukan kegiatan konsinyering LHP	
	Jumlah laporan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) Ombudsman RI bersifat tematik dan selektif khusus Program Prioritas Presiden yang dilaksanakan penyelenggara pelayanan publik	1 Laporan			1 Laporan		TW IV	Triwulan I: - Keasistenan Pemeriksaan Laporan rencana akan melakukan pengambilan data Laporan Informasi terkait IAPS di luar Kota Batam. - Rencana akan dilakukan permintaan keterangan kepada pihak terkait untuk Tindak Lanjut IAPS dalam kota dan luar kota. Triwulan II: - Keasistenan Pemeriksaan Laporan rencana	Keasistenan Pemeriksaan Laporan

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2026	RENCANA PENCAPAIAN KINERJA				RENCANA WAKTU PENYELESAIAN	RENCANA KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
			TW I	TW II	TW III	TW IV			
								akan melakukan pengambilan data Laporan Informasi terkait IAPS di luar Kota Batam. - Rencana akan dilakukan permintaan keterangan kepada pihak terkait untuk Tindak Lanjut IAPS dalam kota dan luar kota. Triwulan III: - Keasistenan Pemeriksaan Laporan rencana akan melakukan penyusunan LHP IAPS dalam kota dan luar kota. Triwulan IV: Keasistenan Pemeriksaan Laporan	

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2026	RENCANA PENCAPAIAN KINERJA				RENCANA WAKTU PENYELESAIAN	RENCANA KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
			TW I	TW II	TW III	TW IV			
								rencana akan melakukan penyerahan LHP IAPS.	
Terwujudnya Penguatan Pencegahan Maladministrasi Guna Perbaikan Pelayanan Publik	Jumlah pemerintah daerah yang dinilai atas opini pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik	8 Pemerintah Daerah			8		TW III	Triwulan I: - Perencanaan kegiatan pengambilan data Pemerintah Daerah Triwulan II: - Workshop penilaian atas opini pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik dengan Pemerintah Daerah Triwulan III: - Pengambilan Data di Pemerintah Daerah Triwulan IV: - Finalisasi Data	Keasistenan Pencegahan Maladministrasi

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2026	RENCANA PENCAPAIAN KINERJA				RENCANA WAKTU PENYELESAIAN	RENCANA KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
			TW I	TW II	TW III	TW IV			
Terwujudnya Pengelolaan Perlengkapan dan Kerumahtanggaan yang Berkualitas	Jumlah layanan pengelolaan operasional dan pemeliharaan kantor	1 Layanan	0.25	0.25	0.25	0.25	TW IV	Triwulan I: - Sekretariat akan melaksanakan layanan pengelolaan operasional dan pemeliharaan kantor sebesar 0,25 atau 25% Triwulan II: - Sekretariat akan melaksanakan layanan pengelolaan operasional dan pemeliharaan kantor sebesar 0,25 atau 25% Triwulan III: - Sekretariat akan melaksanakan layanan pengelolaan operasional dan pemeliharaan	Sekretariat

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2026	RENCANA PENCAPAIAN KINERJA				RENCANA WAKTU PENYELESAIAN	RENCANA KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
			TW I	TW II	TW III	TW IV			
								kantor sebesar 0,25 atau 25% Triwulan IV: - Sekretariat akan melaksanakann layanan pengelolaan operasional dan pemeliharaan kantor sebesar 0,25 atau 25%	

KEPALA PERWAKILAN
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,



Ya Ya Si

Agar Parroha P. Siadari